

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	13

1.5.3	Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	14
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	17
1.6	Sistematika Penulisan	17
BAB II LEGALITAS RESTRUKTURISASI <i>HOLDING</i> VIRTUAL BUMN MIGAS		19
2.1	Konsep <i>Subholding</i> Sebagai Anak Usaha BUMN	19
2.1.1	Tinjauan tentang <i>Holding</i> BUMN.....	19
2.1.2	Pengaturan mengenai <i>Holding Company</i> dan <i>Subholding</i> di Indonesia... ..	22
2.1.3	Status <i>Subholding</i> BUMN Migas.....	25
2.2	Saham dalam Pembentukan <i>Subholding</i>	29
2.2.1	Modal Pembentukan <i>Subholding</i>	29
2.2.2	Komposisi Saham pada <i>Subholding</i>	32
2.3	Konsep <i>Holding</i> Virtual	37
2.3.1	Dasar Pembentukan <i>Holding</i> Virtual	37
2.3.2	Prosedur dalam Pembentukan <i>Holding</i> Virtual.....	39
2.3.3	<i>Holding</i> Virtual Sebagai Bentuk Restukturisasi	41
BAB III AKIBAT HUKUM <i>HOLDING</i> VIRTUAL BUMN MIGAS		44
3.1	Pengendalian Atas <i>Subholding</i> yang Sahamnya Dimiliki <i>Holding</i>	44
3.1.1	Campur Tangan <i>Holding</i> ke dalam Bisnis <i>Subholding</i>	44
3.1.2	<i>Subholding</i> Sebagai Subjek Hukum Mandiri.....	47

3.1.3	Pengintegrasian Doktrin <i>Alter Ego</i> dalam Holding Virtual BUMN Migas.....	49
3.2	Pemilihan Aksi Korporasi <i>Subholding</i>	54
3.2.1	Konsekuensi IPO Sebagai Bentuk Aksi Korporasi.....	54
3.2.2	Keterbukaan Sebagai Perlindungan bagi Para Pihak	58
3.2.3	Pengawasan OJK dalam Proses IPO	62
3.2.4	Pengintergrasian Prinsip GCG dalam Mekanisme IPO <i>Subholding</i> .	66
3.3	RUPS Pada Aksi Korporasi <i>Subholding</i>	71
3.4	Hubungan Hukum dalam <i>Holding</i> Migas Berdasarkan Konsep <i>Holding</i> Virtual	75
3.4.1	Analisa Hubungan Hukum dalam Struktur <i>Holding</i> Migas Pertamina Berdasarkan UUPT	75
3.4.2	Tanggung Jawab Organ <i>Holding</i> pada Perusahaan <i>Subholding</i>	79
3.5	Akibat Hukum <i>Holding</i> Migas Berkaitan dengan Aset Perseroan	88
BAB IV PENUTUP		91
4.1	Kesimpulan	91
4.2	Saran.....	92
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyertaan dan Pentausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Pertamina (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16).